

**KRITIK KONSEP POLITIK MACHIAVELLI DALAM
PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM
(PERBANDINGAN DENGAN TEORI ETIKA POLITIK
AL MAWARDI)**

Fuad Muhammad Zein

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Solo

Email: artzsoul007@gmail.com

Abstract

Basically, politics is a human need. As social beings, humans need to regulate political life. In order to be run in accordance with a common goal, the ethics and morals is a necessity that must be juxtaposed in politics.

However, Machiavelli sense of ethics basing on two things, namely the Ancient Western ethics and Catholic ethics. He is holding on Western ethics derived from the Ancient Romans, whice based on the thinking that to retain power strength of spirit to fight to be the underdog. He stated that the Catholic ethics only make men weak because only orients his life on things that smelled hereafter. This thought does not give real contribution in political battles and power. As for foreign policy, Machiavelli emphasizes the shrewdness prince in terms of diplomacy. He stated that a prince in diplomacy must wear deception lion and the fox (deer).

The difference between Machiavelli's political ethics is in stark contrast to what was formulated by al Mawardi. The difference is based on the basic beliefs between the two is also berbeda. Machiavelli leaned that ethics is not required in power when the condition of the people is unethical, because it was thought worth sia. Berbeda with al Mawardi, who rely on the Qur'an and Sunnah regardless of the conditions masyarakat. He always insisted that every ruler has always adhered to the ethical and moral values that have been described in the Qur'an and as Sunnah. if thus, it can be concluded that, in truth Machiavelli does not provide solutions to community conditions and the improved of politis. Cause stability also what he says violates human nature when it agreed in shaping society, so that he saw the man was an enemy to the other man

Keywords: *Critique of Political Concepts, Ethics, Moral*

Abstrak

Pada dasarnya politik merupakan kebutuhan manusia. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan politik dalam mengatur kehidupannya. Agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama, maka etika dan moral merupakan suatu keniscayaan yang harus disandingkan dalam berpolitik.

Akan tetapi, Machiavelli mendasarkan pengertian etika pada dua hal, yaitu etika Barat Kuno dan etika Katholik. Ia lebih berpegang pada etika Barat Kuno yang berasal dari Romawi, yang didasarkan pada pemikirannya bahwa untuk mempertahankan kekuasaan kekuatan semangat untuk bertempur haruslah diunggulkan. Ia menyatakan bahwa etika Katholik hanya menjadikan manusia lemah karena hanya mengorientasikan hidupnya pada hal-hal yang berbau akherat. Hal ini menurutnya tidak memberikan kontribusi nyata dalam pertarungan politik dan kekuasaan. Sedangkan mengenai politik luar negerinya, Machiavelli menekankan pada kelihaihan pangeran dalam hal berdiplomasi. Ia menyatakan bahwa seorang pangeran dalam berdiplomasi harus memakai muslihat singa dan rubah (kancil).

Perbedaan etika politik antara Machiavelli sangat kontras dengan apa yang dirumuskan oleh al Mawardi. Perbedaan ini didasarkan dari keyakinan dasar antara keduanya yang juga berbeda. Machiavelli menyandarkan bahwa etika tidak diperlukan dalam kekuasaan bila kondisi masyarakat memang tidak beretika, karena hal itu menurutnya sia-sia. Berbeda dengan al Mawardi, yang menyandarkan pada al Qur'an dan as Sunnah dengan tanpa melihat pada kondisi masyarakat. Beliau selalu menekankan agar setiap penguasa selalu berpegang pada nilai etika dan moral yang telah dijelaskan dalam al Qur'an dan as Sunnah. Bila demikian, maka bisa disimpulkan bahwa, sejatinya Machiavelli tidak memberikan solusi terhadap perbaikan kondisi masyarakat dan juga stabilitas politik. karena apa yang ia sampaikan menyalahi sifat alami manusia ketika

bersepakat dalam membentuk masyarakat, sehingga ia melihat manusia adalah musuh bagi manusia yang lain

Kata Kunci: *Kritik Konsep Politik, Etika, Moral*

A. Pendahuluan

Politik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal ini karena politik sebagai sebuah sistem untuk mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan membawa mereka kepada tujuan yang diinginkan bersama. Hubungan antar manusia ini tidak akan mungkin hilang mengingat manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga sebuah pengaturan akan hubungan ini sangat diperlukan agar hubungan ini akan saling menguntungkan setiap individu dalam masyarakat. Artinya, politik sebagai sistem pengatur masyarakat muncul secara alami atas dasar kebutuhan manusia sendiri terhadap politik.

Dalam kaca mata sosiologi, hubungan antar manusia dalam masyarakat bukan hanya disebabkan karena rasa mebutuhkan dari perseorangan saja. Para ahli seperti MacIver, J. L. Gillin, dan J. P. Gillin sepakat bahwa masyarakat terbentuk disebabkan karena adanya rasa saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara ,dan prosedur-prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga manusia bersatu dalam sebuah sistem dan tatanan nilai yang saling mengikan satu sama lain.¹ Artinya, masyarakat yang terkandung di dalamnya hukum-hukum sosial yang berasal dari nilai-nilai dan norma-norma tersebut bersatu dan berkerja sama dalam mengatur kehidupan guna menuju sebuah tujuan yang diinginkan bersama. Dan bila demikian, antara sosiologi dan politik memiliki kesamaan dalam hal terbentuknya masyarakat dan munculnya kebutuhan politik, sehingga norma dan nilai-nilai sosial tadi sedikit banyak berlaku dalam kehidupan berpolitik.

Nilai-nilai inilah yang bila dilihat dalam kacamata filsafat politik merupakan nilai-nilai moral atau etika. Dan

¹M. Munandar Soelaeman, M. S, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung, Ersco, 1995), cetakan kedelapan, h. 63

dengannya pengaturan masyarakat berpedoman.² Hal ini juga dinyatakan oleh sosiolog asal Inggris yang bernama David Berry, bahwa dalam hubungan antar manusia etika tidak bisa dilepaskan, karena dengannya pedoman mengenai hal-hal baik dan buruk dikembalikan.³ Berarti etika dalam politik memiliki posisi yang sangat penting.

Begitu pentingnya etika atau moral dalam politik membuat beberapa pemikir politik memberikan buah pikirannya dalam hal ini. Seperti misalnya St Thomas Aquinas, seorang pemikir politik sekaligus rohaniawan gereja khatolik menjelaskan untuk mengintegrasikan agama dan kekuasaan yang ia gambarkan dalam hukum abadi (*eternal law*) yang berasal dari akal abadi Tuhan.⁴ Sebelumnya filosof seperti Plato dan Aristoteles juga sangat menekankan pentingnya etika ini dengan gambaran negara ideal. Namun pada Abad ke-16, di Barat mulai adanya pemisahan antara etika dengan politik. Hal ini dipelopori oleh negarawan Italia bernama Niccolo Machiavelli.⁵ Dalam pandangannya, etika tidak diperlukan dalam kekuasaan, hanya bila ia mendatangkan keuntungan secara pragmatis barulah etika digunakan. Hal inilah yang kemudian menjadi problem tersendiri dalam kajian politik, khususnya kaitannya dengan etika. Sehingga banyak kalangan yang menyebut Machiavelli ini sebagai “ahli bid’ah” dalam wacana kekuasaan dan politik.⁶

Dalam makalah singkat ini, akan dibahas mengenai buah pikiran Machiavelli dalam hal hubungan antara etika atau moral dengan kekuasaan dalam kehidupan politik. kemudian sedikit kritik terhadapnya, dan perbandingannya dengan konsep teori etika berpolitik atau berkuasa dari ulama

²Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), cetakan keempat, h. 27-28

³David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), h. 34

⁴Dr. Firdaus Syam, M. A, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2007), h. 46-47

⁵Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,....., h. 28.

⁶F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern, dari Machiavelli sampai Nietzsche*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 15.

Islam yang pada kesempatan ini penulis mengambil contoh konsep dari Al Mawardi.

B. Pengertian Politik dan kaitannya dengan Etika

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *politea* atau juga *polis* yang berarti masalah pengaturan kota (negara kota) dan masyarakat.⁷ Dalam kamus *Oxford advanced Learner's Dictionary*, kata “politic” diartikan sebagai sebuah kata sifat dalam sebuah perbuatan atau pekerjaan yang berkenaan dengan aktifitas pengambilan keputusan atau pengadilan yang baik dan bijaksana, *well judged: prudent*.⁸ Dan bila dikembangkan menjadi kata “political” maka dipahami sebagai permasalahan mengenai negara, pemerintahan atau urusan umum masyarakat.⁹ Politik juga diartikan sebagai ilmu kenegaraan atau tata negara, bisa juga diartikan sebagai sebuah kajian yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.¹¹ Kesimpulannya, politik secara etimologi diartikan sebagai sebuah kajian atau pembicaraan mengenai negara dan kekuasaan dalam hal pengambilan keputusan dan pengaturan masyarakat.

Secara terminologi, politik memiliki berbagai macam terminologi, namun sebenarnya tidak saling berbeda jauh antara satu dengan yang lainnya. Arti politik sebenarnya mengandung makna *jama'*, yaitu menyangkut berbagai macam kegiatan bersama dalam rangka memperjuangkan berbagai kepentingan yang berbeda untuk pencapaian tujuan yang dikehendaki. Dalam bukunya, Prof. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa politik merupakan usaha manusia untuk

⁷F. Budi Hardiman dkk, *Empat Esai Etika Politik*, (Jakarta, www.srimulyani.net, 2011), cetakan pertama, h. Vii.

⁸A. S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, ed: Jonathan Crowther, (Oxford University Press, 1995) edisi kelima, h. 893.

⁹*Ibid.*

¹⁰Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Modern*, (Surabaya, Arkola, 2001), h. 616.

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) cetakan keempat, h. 634.

menggapai kehidupan yang baik.¹² Menurut Laswell, objek bahasan politik adalah siapa mendapatkan apa, bila mendapatkannya, dan bagaimana caranya (*who gets what, when, and how*). Menurut John Adams, politik merupakan upaya mendamaikan pandangan-pandangan yang bertentangan agar sampai pada keputusan kolektif tentang apa yang seharusnya dilakukan.¹³ Bila disimpulkan diantaranya, politik sebenarnya berarti sebuah pembicaraan mengenai usaha dalam memenuhi segala macam kebutuhan manusia yang dipadukan dengan nilai-nilai umum yang ada dalam masyarakat dan terangkum dalam sebuah sistem kekuasaan. Atau lebih singkatnya, politik bisa dimaknai sebagai sebuah cara dalam mengatur masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bersama.

Sebenarnya pengertian politik diatas mengacu pada teori pengertian politik secara tradisional. Karena dalam pengertian modern, politik seringkali diartikan sebagai pembahasan yang hanya dalam lingkup masalah kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Seperti misalnya John Locke, Thomas Hobbes, dan juga Jean Jacques Rousseau. Mereka dalam teorinya, banyak berbicara mengenai kekuasaan dan sumber kekuasaan dalam pemerintahan. Namun meski dianggap usang atau tradisional, pengertian politik di atas tidak bisa dilepaskan dalam rangka memahami hakikat politik. Karena biar bagaimana pun, politik yang kaitannya membahas mengenai manusia, tidak akan lepas dari sejarah manusia itu sendiri.

Pandangan manusia mengenai terbentuknya masyarakat ada dua macam. Pertama, mereka yang memandang masyarakat secara optimistis, artinya memandang masyarakat sebagai sebuah kebersamaan yang harmoni dimana setiap individu memandang individu lainnya sebagai sekutu, mitra kerjasama, dan daya-daya yang menguntungkan.¹⁴ Yang kedua, mereka yang memandang masyarakat sebagai sebuah ajang konflik, sehingga memandang manusia lain sebagai saingan atau musuh yang membahayakan.¹⁵ Maka dengan

¹²Prof. Miriam Budiardjo,, h. 13.

¹³John Adams, www.politicalgraveyard.com

¹⁴F. Budi Hardiman dkk, *Empat Esai Etika Politik*,, h. viii-ix.

¹⁵*Ibid.*

keyakinan dasar seperti ini politik dipahami sebagai penentu kawan atau pun lawan. Keyakinan dasar inilah yang kemudian mempengaruhi hubungan antar manusia dalam bersikap dan berperilaku terhadap orang lainnya dalam sebuah masyarakat tersebut.

Bila mengacu pada penjelasan di atas, maka penentuan kawan atau lawan juga berkaitan dengan penentuan baik dan buruk dalam menentukan sebuah keputusan. Dalam kajian filsafat politik hal ini sangat terkait dengan permasalahan mengenai etika.¹⁶ Etika diartikan sebagai sebuah ajaran moral tertentu tentang nilai-nilai mengenai baik dan buruk. Dalam hal lain, etika juga dipahami sebagai ilmu yang mengkaji pandangan hidup dan juga perilaku manusia dalam bidang moral melalui pendekatan refleksi filsafat.¹⁷ Tugas tertentu bagi etika adalah mencari ukuran yang baik-buruk bagi tingkah laku manusia.¹⁸ Bila dalam politik, maka dalam hal ini etika sebagai ukuran baik-buruk sebuah perilaku antara penguasa dan juga rakyat, selain itu ukuran bagi kebijaksanaan yang akan berpengaruh dalam perilaku manusia dalam masyarakat.

Dari sedikit pemaparan di atas, paling tidak bisa disimpulkan bahwa kaitan antara politik dengan etika sangat erat. Politik sebagai alat atau sistem yang dibuat manusia mengenai kekuasaan yang terdiri dari penguasa dan rakyat yang dikuasai terbentuk karena adanya faktor kemajemukan manusia dan keinginan manusia untuk hidup bersama manusia lain disebabkan rasa saling membutuhkan di antara mereka. Sedangkan etika memberikan pedoman mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang kaitannya dengan baik-buruk dalam hubungan antar manusia ini. Etika sebagai alat pertimbangan bagi penguasa dalam menentukan kebijakan. Kemudian karena etika ini merupakan salah satu cabang dari filsafat, tidak banyak dari penguasa yang memahami hal ini. Pembahasan mengenai filsafat etika ini banyak dikaji oleh para filosof entah ia juga sebagai pejabat pemerintahan atau bukan. Mereka menuangkannya dalam karya-karya mereka

¹⁶Prof. Miriam Budiardjo,, h. 27.

¹⁷Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), h. 8.

¹⁸Poedjawijatna, *Etika: Filsafat Tingkah Laku*, (Jakarta, Rineke Cipta, 1990), h. 6.

sebagai nasehat atau pun masukan mereka kepada penguasa. Dan diantaranya adalah Niccollo Machiavelli dalam *masterpiece*-nya *The Prince*, dan dari ulama Islam adalah Abu al Hasan al Mawardi dalam bukunya *Tashilu an Natzar wa Ta'jilu atz Tzufr fi Akhlaqi al Mulk*.

C. Pembahasan

1. Latar Belakang Politik Machiavelli

Machiavelli merupakan negarawan Italia yang ketika masanya ia berada dalam kerajaan Florence. Kondisi perpolitikan Florence pada masa kehidupan Machiavelli tidaklah bisa dikatakan bagus. Florence merupakan sebuah kerajaan yang berbentuk polis di wilayah Italia. Pada masa ini, kehidupan politik Italia diwarnai dengan perebutan kekuasaan dan penjajahan wilayah dari kerajaan-kerajaan di Italia, maupun kerajaan-kerajaan besar disekitar Italia, seperti Perancis, Spanyol, dan juga Jerman.¹⁹ Pengaruh zaman Renaissance juga turut memperburuk kondisi sosial ketika itu. Pada masa ini, pada umumnya, masyarakat mulai melepaskan diri dari kungkungan gereja dan paham skolastik. Moral tidak diperdulikan, pengkhianatan dalam berkawan, nafsu untuk dapat berkuasa tanpa memperhatikan segi kewajaran sangat merajalela. Masa renaissans menumbuhkan kecurigaan-kecurigaan di kalangan sesama kawan, sampai pada taraf pemerintahan.²⁰

Niccollo Machiavelli lahir pada masa ini di Florence, Italia pada tahun 1469. Ayahnya seorang pengacara terkemuka yang bernama Bernardo Machiavelli. Dalam usiannya yang ke 6 tahun, Machiavelli sudah mempelajari bahasa Latin. Kemudian pada umur 12 tahun ia telah mempelajari ilmu-ilmu kemanusiaan dari Paulo Ronsiglione dengan menggunakan bahasa Latin, dan pada umurnya yang ke 14, Machiavelli telah mampu menulis dengan karangan dalam bahasa Latin dengan meniru gaya penulisan Klasik. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas

¹⁹Anthony Kenny, *A New History of Western Philosophy, vol 3, The Rise of Modern Philosophy*, (Oxford, Clarendon Press, 2006), h. 288.

²⁰Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung, Penerbit Mizan, 1998) cetakan ketiga, h. 87-88.

Florence dengan mempelajari kajian klasik dari Marcello Adriani.²¹

Machiavelli memasuki dunia pemerintahan di Florence pada usianya yang ke 25 tahun. Ia mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan setelah runtuhnya kekuasaan dinasti Medici di Florence. Ia pernah menjabat sebagai seorang diplomat yang menjalin hubungan dengan negara-negara sekitarnya dan juga mengatur organisasi ketentaraan dan korespondensi resmi negaranya.²² Dalam karirnya sebagai diplomat ini, Machiavelli telah berkeliling ke negara-negara sekitarnya. Dalam pengalamannya ini, ia memperkaya pengetahuannya mengenai fenomena politik. Dengan kecerdasannya, ia mampu menilai secara tepat dan cepat dalam menentukan kekuatan dan kelemahan lawan maupun korps diplomatiknya dalam setiap situasi. Ia juga menyimpulkan bahwa kekuatan dan muslihat selalu digunakan dalam praktik politik di negara-negara yang telah ia kunjungi, sehingga ia berkesimpulan bahwa dua hal itulah yang harus digunakan dalam mempertahankan kekuasaan.²³

Pada tahun 1512 ketika keluarga Medici kembali berkuasa, karir politiknya seketika hancur. Ia ditangkap atas tuduhan ikut serta dalam konspirasi pemberontakan terhadap keluarga Medici. Ia kemudian dipenjarakan selama setahun. Setelah ia bebas, ia diasingkan di pinggiran kota Florence di sebuah rumah kecil dengan kebun kecilnya. Di tempat inilah ia melakukan perenungan dan refleksi atas segala pengalaman politiknya. Pada masa-masa ini pula ia menulis beberapa buku mengenai politik dan kekuasaan. Namun yang paling fenomenal dari buku-bukunya adalah *Il Principe* yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *The Prince*. Buku inilah yang berisi mengenai nasihat-nasihat Machiavelli kepada penguasa Florence ketika itu yaitu Lorenzo De Medici. Maksud penulisan buku ini adalah ingin mengambil hati penguasa tersebut agar mengangkatnya kembali menjadi pejabat negara dalam kerajaan Florence. Namun ternyata usahanya itu gagal dan ia tetap dalam

²¹Dr. Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*,....., h. 106.

²²Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*,, h. 88.

²³Rapar, *Filsafat Politik Machiavelli*, (Jakarta, Rajawali Press, 1991), h. 18.

pengasingannya hingga mati pada tanggal 22 Juni tahun 1527.²⁴

2. Praktik Berkuasa menurut Machiavelli

Dalam pembahasannya mengenai etika berkuasa ini, Machiavelli mendasarkan pengertian etika pada dua hal, yaitu etika Barat Kuno, yang berasal dari budaya Romawi Kuno, dan yang kedua adalah etika Katholik, yang merupakan doktrin dari gereja Katholik Roma. Ia lebih berpegang pada etika Barat Kuno yang berasal dari Romawi. Hal ini didasarkan pada pemikirannya bahwa untuk mempertahankan kekuasaan kekuatan semangat untuk bertempur haruslah diunggulkan, seperti halnya pada masa Julius Cesar atau Cesare Borgia, seorang penguasa Florense sebelum kelahiran Machiavelli yang sangat licik dan gila kekuasaan.²⁵ Ia menganggap etika Katholik tidak mendatangkan manfaat itu. Ia menyatakan bahwa etika Katholik hanya menjadikan manusia lemah karena hanya mengorientasikan hidupnya pada hal-hal yang berbau akherat. Hal ini menurutnya tidak memberikan kontribusi nyata dalam pertarungan politik dan kekuasaan. Meski begitu, ia tidak menolak secara tegas mengenai etika Katholik ini, namun etika ini bisa digunakan sebagai tujuan pragmatis dalam kekuasaan, seperti misalnya untuk menyatukan rakyat.²⁶

Dalam bukunya ini, khususnya pada bab ke 17 sampai bab ke 20 ia memberikan nasehatnya kepada penguasa waktu itu mengenai bagaimana ia harus bersikap terhadap rakyat dan cara berdiplomasi terhadap raja-raja kerajaan lainnya. Pada bab ke 17, ia menjelaskan bahwa seorang pangeran harus menimbulkan rasa cinta dan ketakutan dari rakyatnya kepadanya. Namun, bila hal ini sulit dilakukan, ia menyatakan bahwa seorang pangeran lebih baik ditakuti dari pada dicintai oleh rakyatnya.²⁷ Kemudian ia juga menyarankan untuk tidak selalu berpedoman pada

²⁴F. Budi Hardiman, *Filasafat Modern, dari Machiavelli sampai Nietzsche*,, h. 16.

²⁵*Ibid*, h. 17-18.

²⁶Niccollo Machiavelli, *The Prince*, trans: W. K. Marriott, The Electronic Classic Series, (Pennsylvania University, 2001), h. 30-35. Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*,, h. 88-89.

²⁷Niccollo Machiavelli, *The Prince*,.....h. 66.

keutamaan, namun lebih baik berlindung dengan keburukan bila memang itu sesuai dengan tujuannya.²⁸

“....And again, he need not make himself uneasy at incurring a reproach for those vices without which the state can only be saved with difficulty, for if everything is considered carefully, it will be found that something which looks like virtue, if followed, would be his ruin; whilst something else, which looks like vice, yet followed brings him security and prosperity.”

Kemudian ia juga menyatakan untuk tidak menjadi seorang yang mulia. Karena itu, menurutnya, akan menjadikannya lemah dan hina, dan bila demikian maka wibawanya akan jatuh dihadapan rakyat. Selanjutnya, juga tidak bersikap baik, karena itu akan menumbuhkan rasa pemberontakan dari rakyatnya karena menganggap sang raja tidak tegas dan tidak berani. Sedangkan dengan kekerasan, akan menstabilkan peraturan dan menghindarkan kekacauan. Mengenai kerelaan rakyat, Machiavelli mengatakan agar pangeran untuk tidak selalu berpedoman pada hal tersebut, karena kerelaan dan keinginan mereka selalu berubah-ubah, maka dari itu agar selalu berpedoman pada kekuatannya, karena bila ia konsisten pada kekuatannya, maka kekuasaannya akan bertahan.²⁹ Dalam bukunya, Deliar Noer mengutip pernyataan Machiavelli dalam hal keahlian pangeran. Ia menjelaskan bahwa setiap pangeran haruslah tidak menyibukkan pada hal-hal yang lain kecuali kemahiran berperang. Sebab menurutnya, keahlian itulah yang diperlukan dalam memerintah.³⁰

Mengenai pernyataannya ini, Machiavelli menyadari bahwa hal ini memang terdengar tidak baik, namun, hal ini tidak baik bila semua manusia berkepribadian baik. Tapi pada kenyataannya, menurutnya, manusia itu tidak baik. Mereka selalu melakukan hal-hal yang buruk, ingkar janji, tamak kekuasaan, pembohong, munafik, dan lain sebagainya. Bahkan ia menggambarkan bahwa manusia-manusia itu tidak akan terlalu marah bila ayahnya terbunuh, namun bila mereka kehilangan harta atau warisannya, mereka akan benar-benar

²⁸*Ibid.*, h. 72-73.

²⁹*Ibid.*, h. 75.

³⁰Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*,, h. 92.

marah, “...because men more quickly forget the death of their father than the loss of their patrimony.”³¹

Mengenai politik luar negerinya, Machiavelli menekankan pada kelihaian pangeran dalam hal berdiplomasi. Ia menyatakan bahwa seorang pangeran dalam berdiplomasi harus memakai muslihat singa dan rubah (kancil). Singa sebagai raja hutan memiliki kekuasaan dikarenakan kekuatannya dan kebuasannya sehingga hewan-hewan lainnya takut. Kemudian, kelihaian rubah dalam tipu muslihat mampu menyelamatkan dirinya dari jebakan hewan lain atau dari pemburu. Dua hal ini yang ditekankan oleh Machiavelli kepada penguasa dalam berdiplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain.³²

Ia menganggap bahwa dunia ini bagaikan hutan belantara dengan manusia-manusia di dalamnya seperti apa yang ada dalam hutan. Ia tidak harus menepati janjinya bila memang hal itu tidak mendatangkan keuntungan baginya. Ia harus bersikap seolah-olah baik dihadapan raja-raja lain, meski pada hakikatnya belum tentu baik, atau bagaikan serigala berbulu domba. Ia mengingatkan bahwa raja-raja lain pun berfikir sama. Mereka juga tidak akan menepati janjinya, akan berkhianat bila waktunya tepat. Maka dari itu, ia harus betul-betul bermain seperti halnya rubah atau kancil dalam bertipu muslihat. Namun, bila hal itu pun tidak berhasil, maka kekuatan singa dimunculkan, atau dengan kata lain, gendang perang perlu ditabuh.³³

Inilah beberapa nasehat Machiavelli pada Lorenzo De Medici, penguasa Florentina waktu itu. Ia menekankan bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Untuk mempertahankan kekuasaan di tengah persaingan perebutan kekuasaan, segala cara bisa digunakan asal sesuai dengan tujuan dan maksud penguasa. Bahkan bila hal itu mengharuskan kekejaman sekalipun. Namun meski begitu, ia tidak menafikkan moral dan agama secara keseluruhan. Ia hanya menganggap bahwa moral dan agama tidak terlalu memberikan efek positif dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. kecuali jika memang keduanya bisa

³¹Niccollo Machiavelli, *The Prince*,....h. 80.

³²*Ibid.*, h. 84.

³³*Ibid.*, h. 86.

memberikan manfaat dalam maksud dan tujuan kekuasaan, barulah keduanya bisa digunakan.

3. Kritik atas pemikiran Machiavelli

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemikiran politik Machiavelli didasarkan pada refleksi politik di masa ia hidup. Ia menjadikan fenomena politik yang terjadi ketika itu sebagai pedoman dalam praktik politiknya. Segala macam tindak keburukan dari tabiat manusia Eropa ketika itu ia jadikan sebuah kesimpulan bahwa manusia memang selalu condong kepada hal yang buruk, sehingga penguasa juga harus mahir dalam hal ini agar kekuasaannya bisa berjalan efektif dan bertahan lama. Maka yang terjadi adalah segala nasehat Machiavelli kepada penguasa Florense ketika itu, yaitu Lorenzo De Medici, adalah nasehat untuk berbuat makar dan jauh dari kesan moral yang baik.

Bila teori Machiavelli ini dihadapkan pada teori-teori kekuasaan yang berkembang setelahnya akan sangat berbeda. Seperti misalnya pemikir politik Thomas Hobbes, John Locke, kemudian Rousseau. Ketiga filosof tersebut selalu menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya sejalan dengan hukum alam yang ada. Kekuasaan harus berasal dari rakyat, sehingga kebijakan penguasa tidak boleh keluar dari aspirasi rakyat. Dan bila hal tersebut terjadi, maka rakyat berhak untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa.³⁴ Jika demikian, berarti stabilitas politik akan terganggu.

Kemudian, seperti yang disebutkan Deliar Noer dalam bukunya, bahwa Machiavelli mengingkari penerapan hukum alam dalam tindak politik. Ia menjelaskan bahwa Machiavelli menolak hukum ini dengan mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap hukum tersebut, dan hukum apapun itu apakah sesuai dengan kemegahan, kekuasaan. Bila tidak maka hal tersebut tidak diperlukan, bahkan kalau memang diperlukan, seorang penguasa diperbolehkan untuk menipu atau memperdaya.³⁵ Namun hal ini seakan bertentangan dengan pemikirannya sendiri mengenai hukum singa dan rubah. Kekuatan dan tipu muslihat yang ia ambil dari kedua hewan tersebut telah menjadikannya berpedoman dengan hukum

³⁴Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*,, h. 126.

³⁵Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*,, h. 88-89.

alam. Yaitu kekuasaan adalah kekuatan dan muslihat. Oleh karena itu dalam hal ini terlihat bahwa Machiavelli tidak konsisten dengan pemikirannya.

Kemudian, Machiavelli juga dianggap sebagai pemikir Modern dan juga dianggap sebagai pencetus ide politik yang lebih maju dari sebelumnya. Namun pada kenyataannya, disetiap teori yang ia kemukakan, selalu merujuk pada fenomena masa lalu, jauh sebelum kelahiran Machiavelli sendiri. Seperti yang selalu ia sebutkan dalam bukunya mengenai praktik politik Cesare Borgia yang ia anggap sebagai tokoh penguasa yang patut dianut. Kemudian fanatismenya pada kemegahan imperium Romawi Kuno juga menjadikan bahwa pemikirannya ini tidak orisinil dari dia, namun hanya merangkum fenomena terdahulu yang ingin ia hidupkan kembali.³⁶

Franz Magnis Suseno dalam *Kuasa dan Moral* mengkritisi pemikiran politik Machiavelli. Menurutnya Machiavelli melupakan dua hal. *Pertama*, bahwa kekuasaan yang berdasarkan kebrutalan dan kelicikan dengan sendirinya akan rapuh. Kekuatan yang hanya berdasarkan faktor-faktor tersebut sepenuhnya hanya berasal dari kekuatan pribadi raja, sementara faktor-faktor lain di luar raja selalu bersiap untuk menyerangnya jika keadaan memungkinkan. Jika raja lengah sedikit saja, ia pasti jatuh. Kekuasaan yang hanya berdasarkan intrik tidak akan pernah stabil. *Kedua*, Machiavelli tidak melihat bahwa stabilitas kekuasaan tergantung dari apakah kekuasaan dipandang sebagai sah atau tidakoleh masyarakat. Ia memang menyadari bahwa jika seorang raja ingin kekuasaannya lestari, maka sang raja harus memenuhi harapan rakyat. Namun bukankah harapan rakyat akan selalu terus bertambah dan bertambah? Ini akan sangat menyulitkan raja. Raja tidak mungkin dapat memenuhi semua harapan rakyat yang selalu bertambah itu. Raja akan lebih selamat jika ia memadukan kekuasaannya dengan moralitas. Jika kekuasaan raja memiliki legitimasi moral dan diakui sah oleh masyarakat secara suka rela, maka kekuasaannya akan stabil.³⁷

³⁶*Ibid.*, h. 89.

³⁷Franz Magnis-Suseno, *Kuasa & Moral*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 9.

Dari beberapa kritik di atas bisa diketahui bahwa praktik politik yang ingin diberikan Machiavelli tidak sesuai dengan praktik politik sewajarnya. Meski ia tidak pernah menyatakan dalam bukunya *The Prince* bahwa nasehatnya itu untuk orang lain, namun pemikiran yang ia cetuskan tetap saja mengingkari prinsip dasar politik yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mengenai munculnya masyarakat dan kebutuhan terhadap politik. Sehingga, bila apa yang ia kemukakan ini ditujukan pada dirinya sendiri, ia juga akan menolak. Berarti bahwa teorinya ini terjadi paradok dalam internal dirinya sendiri. Dan hal ini cukup untuk menyatakan bahwa teorinya bermasalah.

4. Etika Berkuasa menurut Al Mawardi

Bila pemikiran Machiavelli di atas dibandingkan dengan teori politik Islam, maka akan sangat bertolak belakang. Terutama pada masalah moralitas dan akhlaq dalam berpolitik atau berkuasa. Dalam Islam, tidak ada dikotomi antara politik dan etika atau moral, tetapi justru memadukannya.³⁸ Imam al Ghozali berpendapat bahwa akhlaq merupakan sesuatu yang inti dalam praktik politik.³⁹ Maka setiap manusia yang berpartisipasi dalam praktik politik ini harus menegakkan akhlaq sebaik-baiknya.

Selain Imam al Ghozali dengan karyanya *at Tibru al Masbuk fi Nasihati al Mulk*, ada ulama lain yang juga mempunyai karya dalam masalah etika berkuasa. Ia adalah Abu al Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al Badhri al Mawardi dengan karyanya *Tashilu an Natzar wa Ta'jilu atz Tzufri fi Akhlaqi al Mulk*. Selain bukunya ini, beliau juga mempunyai karya lain dalam masalah politik, yaitu *al Ahkam ash Shulthoniyyah*.

Al Mawardi pada masa hidupnya memiliki kaitan erat dengan pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai duta dari Daulat Abbasiyah. Dari pengalamannya inilah dan juga kedalaman ilmunya, ia mampu membuahkan pemikiran

³⁸ Ahmad Muslim, *Esensi al Qur'an, Filsafat Politik Ekonomi Etika*, (Bandung, Mizan, 1984), cetakan pertama, h. 40.

³⁹ Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad al Ghozali, *al Iqtishad fi al I'tiqad*, (Mesir, Makatabah al Jundi, 1518), h. 195.

politiknya.⁴⁰ Pengalamannya tersebut kemudian ia sesuaikan dengan apa yang telah tertulis dalam al Qur'an dan as Sunnah, sehingga teorinya dalam politik sangat pas bila dijadikan rujukan dalam hal etika politik atau etika berkuasa.

Dalam bukunya *Tashil*, beliau menasehati sang penguasa untuk selalu berpegang teguh pada akhlaq yang mulia. Beliau berkata, bahwa barang siapa yang memiliki kekuasaan agar selalu memperhatikan akhlaqnya, dan memperbaiki tingkah lakunya. Karena hal itu merupakan asas kekuasaannya.⁴¹ Selanjutnya, beliau juga mengingatkan agar penguasa selalu menjaga ke-istiqomah-annya dalam berbuat dan berakhlaq baik sebelum memerintah rakyatnya, karena hal itu akan memberikan kemuliaan dan keutamaan baginya, rakyat dan negaranya.⁴² Dan juga agar selalu menjauhi sikap sombong, karena seorang penguasa diukur kebesarannya dari apa yang telah ia kerjakan, bukan dari kesombongannya di depan rakyatnya.⁴³

Selain itu, beliau mengingatkan para penguasa agar selalu berhati-hati dari saran dan masukan para munafik. Maka dari itu agar selalu bisa membedakan antara penasehat yang bisa dipercaya, dan munafiq yang hanya demi kepentingannya saja.⁴⁴ Bila demikian, maka seorang penguasa juga harus selalu jujur, menjaga lisannya, dan berbicara mengenai hal-hal yang memang dianggap penting untuk disampaikan. Karena kebohongan akan tersingkap dengan berjalannya waktu. Maka dari itu, sebelum menyampaikan suatu hal, penguasa harus betul-betul memikirkannya, karena hal itu akan selalu menjadi tanggung jawabnya.⁴⁵

Hal lain yang tidak kalah penting dalam nasehat al Mawardi dalam bukunya ini adalah perintah untuk selalu bermusyawarah. Beliau mengatakan agar penguasa selalu

⁴⁰A. Djazuli, M.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, edisi revisi, (Jakarta, Prenada Media, 2003), cetakan pertama, h. 13.

⁴¹Abu al Hasan al Mawardi, *Tashilu an Natzr wa Ta'jilu atz Tzufr fi Akhlaqi al Mulk*, ed: Muhyi Hilal as Sarhani wa Hasan as Sa'ati, (Beirut, Dar an Nahdhoh al 'Arabiyyah), h. 8.

⁴²*Ibid.*, h. 46.

⁴³*Ibid.*, h. 41.

⁴⁴*Ibid.*, h. 52.

⁴⁵*Ibid.*, h. 58.

bermusyawarah dengan para *ahlu 'ilmi*, sehingga keputusannya betul-betul jernih dan kemungkinan salahnya kecil. Karena keputusan individu tanpa musyawarah lebih berbahaya di beberapa hal dari pada pendapat musyawarah.⁴⁶

Al Mawardi pun memberikan saran kepada penguasa agar kekuasaannya bisa bertahan dan lestari. Ia menyarankan agar setiap penguasa selalu memeriksa keadaan rakyatnya dengan menanyakan kabar mereka. Dan menjalankan pekerjaan ini dengan sikap amanah dan ikhlas. Selain itu, adalah agar selalu berpengaruh sholeh dan juga tegas dan kuat, serta mengetahui keadaan Negara sekitarnya dan menjalin hubungan baik dengan mereka.⁴⁷

Inilah beberapa nasehat al Mawardi kepada penguasa dalam bukunya *Tashil an Natzr*. Bila diperhatikan, maka akan sangat berbeda sekali dengan apa yang telah disampaikan Machiavelli dalam bukunya *The Prince*. Nasehat al Mawardi lebih dekat dengan sifat alami manusia, dan hakikat politik dalam masalah hubungan manusia dan munculnya masyarakat. Sehingga teori al Mawardi ini bisa lebih baik dari pada Machiavelli.

D. Kesimpulan

Politik sebagai sebuah sistem dalam kehidupan manusia mempunyai porsi yang cukup penting. Hingga bisa dikatakan, tidak ada satu komunitas manusia di mana pun yang terlepas dari politik. Hal ini karena politik muncul secara alami atas dasar kebutuhan manusia mengenai pengaturan hidupnya dan menghindari konflik antar sesama manusia dalam menuju kesejahteraan bersama. Sistem dan konsep politik tersebut terpusat dalam masalah kekuasaan. Bila politik merupakan unsur alami dalam lingkup komunitas manusia yang disebut masyarakat, maka nilai-nilai masyarakat akan sangat berpengaruh dalam politik juga. Maka kekuasaan juga harus dibangun di atas nilai-nilai dan norma-norma tersebut.

Nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat itulah yang akan mengikat setiap individu masyarakat. Meski setiap manusia memiliki kepentingannya masing-masing, namun hal tersebut telah melebur dalam sebuah kesepakatan bersama ketika mereka sepakat dalam membentuk sebuah masyarakat.

⁴⁶*Ibid.*, h. 99-104.

⁴⁷*Ibid.*, h. 196.

Inilah yang disebut dengan *general will*. Dan dari norma-norma tersebut, membentuk sebuah pedoman dalam menentukan baik-buruk dalam kehidupan masyarakat. Dan inilah yang disebut dengan etika public atau etika berpolitik.

Perbedaan etika politik antara Machiavelli sangat kontras dengan apa yang dirumuskan oleh al Mawardi. Perbedaan ini didasarkan dari keyakinan dasar antara keduanya yang juga berbeda. Machiavelli menyandarkan bahwa etika tidak diperlukan dalam kekuasaan bila kondisi masyarakat memang tidak beretika, karena hal itu menurutnya sia-sia. Berbeda dengan al Mawardi, yang menyandarkan pada al Qur'an dan as Sunnah dengan tanpa melihat pada kondisi masyarakat. Beliau selalu menekankan agar setiap penguasa selalu berpegang pada nilai etika dan moral yang telah dijelaskan dalam al Qur'an dan as Sunnah. Bila demikian, maka bisa disimpulkan bahwa, sejatinya Machiavelli tidak memberikan solusi terhadap perbaikan kondisi masyarakat dan juga stabilitas politik. karena apa yang ia sampaikan menyalahi sifat alami manusia ketika bersepakat dalam membentuk masyarakat, sehingga ia melihat manusia adalah musuh bagi manusia yang lain. *Wallahu a'lam bi as showab*

Daftar Pustaka

- Al Ghozali, Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad, *al Iqtishad fi al I'tiqad*, (Mesir, Makatabah al Jundi, 1518)
- Al Mawardi, Abu al Hasan, *Tashilu an Natzr wa Ta'jilu atz Tzufr fi Akhlaqi al Mulk*, ed: Muhyi Hilal as Sarhani wa Hasan as Sa'ati, (Beirut, Dar an Nahdhoh al 'Arabiyyah)
- Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), cetakan keempat
- Hardiman, F. Budi, *Filasafat Modern, dari Machiavelli sampai Nietzsche*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Hardiman, F. Budi, dkk, *Empat Esai Etika Politik*, (Jakarta, www.srimulyani.net, 2011), cetakan pertama

- Hornby, A. S, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, ed: Jonathan Crowther, (Oxford Univrsity Press, 1995) edisi kelima
- Kenny, Anthony, *A New History of Western Philosophy, vol 3, The Rise of Modern Philosophy*, (Oxford, Clarendon Press, 2006)
- Machiavelli, Nicollo, *The Prince*, trans: W. K. Marriott, The Electronis Classic Series, (Pensylvania University, 2001)
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung, Penerbit Mizan, 1998) cetakan ketiga
- Soelaeman, M. Munandar, M. S, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung, Ersco, 1995), cetakan kedelapan
- Magniz-Suseno, Franz, *Kuasa & Moral*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Syam, Firdaus, M. A, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2007)